

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor merupakan salah satu profesi yang sangat bergengsi, walaupun demikian profesi tersebut memiliki sejumlah tantangan dan risiko yang harus dapat dikelola oleh orang yang terpilih melakukan profesi tersebut (Khasharmeh dan Joseph, 2017). Tugas utama seorang auditor adalah melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan untuk dijadikan sebagai acuan bagi *stakeholders* khususnya investor dalam mengambil keputusan investasi. Selain itu laporan keuangan yang merupakan hasil audit auditor juga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi yang akan menentukan pandangan *image* mereka pada perusahaan yang telah diaudit. Oleh sebab itu sangat penting bagi auditor untuk menjaga kualitas audit yang mereka hasilkan. Mengingat ketika seorang auditor mampu menjaga kualitas audit yang mereka hasilkan maka akan meningkatkan reputasi dari auditor tersebut (Lesmana dan Machdar, 2015).

Arens et al., (2012) mengungkapkan setiap auditor ingin mendapatkan reputasi yang tinggi dari masyarakat termasuk perusahaan klien yang mengontrak mereka, untuk mewujudkan hal tersebut setiap audit selalu berlomba untuk menjaga hasil kualitas audit yang telah mereka kerjakan dalam bentuk opini audit yang teruji dan handal. Jika mengacu pada hal tersebut pada saat ini sangat sulit untuk mendapatkan jasa seorang auditor yang berkualitas, karena begitu banyak laporan audit yang kurang berkualitas atau teridentifikasi mengandung aspek kecurangan dalam bentuk salah saji tentunya merugikan pihak-pihak yang menggunakan laporan audit tersebut.

Beberapa kasus tersebut terlihat dari sejumlah temuan audit yang dilakukan auditor pemerintah daerah untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat. Temuan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian biaya pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru serta denda keterlambatan atas belanja modal dalam bentuk gedung dan bangunan. Dari ketidaksesuaian tersebut auditor menduga adanya kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah, dan laporan kecurangan tersebut harus segera ditindaklanjuti. Walaupun demikian auditor BPK tetap memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ketujuh kali secara berturut turut dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat (Kumalasari, 2019).

Diberikan opini audit WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat tentu menjadi tanda tanya ditengah adanya temuan kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, selain itu kejanggalan tersebut menunjukan kualitas audit auditor BPK menjadi diragukan serta akan menciptakan pro dan kontra dimasyarakat yang tentunya akan menurunkan reputasi pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka tingkat kepercayaan publik pada pemerintah khususnya dalam mengelola aset keuangan akan semakin menurun, sehingga penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi kualitas audit khususnya auditor pemerintah daerah (Chandra, 2021).

Beberapa kasus yang berkaitan dengan indikasi kecurangan (fraud) dalam pengelolaan aset keuangan pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1
Beberapa Kasus Kecurangan Hasil Temuan BPK di Sumatera Barat
Tahun 2017 – 2021

No	Tanggal ./ Tahun	Kasus	Informasi
1	Antara News 8 Mei 2021	BPK Temukan Dua Kejanggalan dalam LKPD Sumbar 2020	Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Sumatera Barat (Sumbar) menemukan kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat 2020, meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala Perwakilan BPK Sumbar Yusnadewi dalam siaran pers di Padang, Jumat, mengatakan temuan itu yakni pembayaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan oleh Dinas Pendidikan Sumbar sebesar Rp516,7 juta. Selain itu, temuan kedua adalah pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Sumbar sebesar Rp12,47 miliar yang juga tidak sesuai dengan ketentuan (Chandra, 2021). Selain itu aliran pemanfaatan dan pencatatan dana tersebut juga tidak dilakukan secara transparan sehingga memancing pro dan kontra yang terus di selesaikan hingga saat ini
2	Tribun-News 20 Maret 2020	Temuan Potensi Kecurangan Rp 2.94 Triliyun di Sumbar	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kejanggalan penggunaan dana Covid 19 sebesar Rp 2.94 Triliyun. Kejanggalan tersebut terlihat dengan banyaknya kegiatan yang mengatasnamakan keputusan mata rantai Covid 19 akan tetapi setelah ditelusuri kegiatan tersebut fiktif, kegiatan tersebut dilakukan oleh sejumlah instansi kesehatan yang mengatasnamakan pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam rentang waktu April 2020 sampai dengan Agustus 2021 yang lalu (Wibisono, 2021). Dalam kasus tersebut pemanfaatan dana dianggap tidak wajar, dan terkesan pihak instansi tertentu khususnya Dinas Kesehatan mencoba melakukan penggelembungan dana Covid 19
3	Antara News 26 April 2019	BPK ungkap Sejumlah Temuan di Laporan Keuangan Pemda Sumbar	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah temuan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat mulai dari pertanggungjawaban perijinan dinas tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru serta denda keterlambatan atas belanja modal gedung dan bangunan. Ketua BPK RI Moermahdi Soerja dalam sidang paripurna DPRD Sumbar di Padang, Jumat mengatakan temuan tersebut merupakan temuan kepatuhan sementara untuk temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen (SPI), BPK menemukan potensi penerimaan belum dikelola secara maksimal, kesalahan setor atas penerimaan di RSUD Solok serta pencatatan aset yang belum dilakukan secara memadai (Wibisono, 2019)

Sumber: Observasi Data Sekunder (2021)

Berbagai temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa masih besar peluang bagi sejumlah pihak yang berkepentingan untuk melakukan kecurangan, agar mendapatkan keuntungan pribadi yang mengatasnamakan instansi pemerintah daerah, ketika perilaku tersebut tidak ditindaklanjuti maka reputasi dari instansi pemerintah daerah akan semakin menurun. Selain itu temuan negatif yang diperoleh BPK mengisyaratkan tingkat kualitas audit internal yang dilakukan pemerintah relatif cukup baik dalam mendeteksi kecurangan, sehingga sangat penting untuk auditor BPK untuk terus dapat mempertahankan hal tersebut dimasa mendatang. Oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit pada lembaga pemerintah daerah di Sumatera Barat.

Menurut Hery (2017) kualitas audit pada sejauhmana hasil audit yang berhasil diperoleh auditor pemerintah daerah benar-benar menggambarkan kondisi perusahaan, atau melahirkan opini yang menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan atau lembaga pemerintah secara keseluruhan pada waktu tertentu. Keberhasilan auditor pemerintah dalam meningkatkan kualitas audit tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal yang dimiliki auditor dalam bertugas, Menurut Amran dan Selvia (2019) mengungkapkan kualitas audit dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel diantaranya adalah etika auditor, pengalaman dan independensi auditor. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hanjani (2014) kualitas audit dapat dipengaruhi oleh etika auditor, pengalaman yang dimiliki auditor dan kebebasan auditor dalam bertugas.

Menurut Arens et al., (2012) etika auditor merupakan acuan perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang auditor dalam bekerja. Seorang auditor dapat dinyatakan profesional apabila mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan atau pedoman-pedoman kode etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan semua aktivitasnya akuntan publik mempunyai arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan bisa dipertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang menggunakan keputusan tersebut. Semakin tinggi implementasi etika profesi yang dijalankan oleh auditor maka akan meningkatkan kualitas audit.

Hasil penelitian Rahayu dan Suryono (2016) menemukan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, temuan yang sejalan juga diperoleh oleh Amran dan Selvia (2019) mengungkapkan semakin tinggi implementasi etika auditor akan semakin meningkatkan kualitas audit. Temuan yang tidak sejalan juga diperoleh oleh Kamil et al., (2018) menemukan bahwa etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Menurut Suyanti et al., (2016) mengungkapkan pengalaman yang dimiliki auditor juga menjadi faktor yang menentukan kualitas audit. Ketika auditor yang ditugaskan melakukan audit laporan keuangan memiliki pengalaman yang tinggi, maka kemampuan mereka untuk mendeteksi kecurangan akan semakin tinggi, ketika auditor berani untuk mengungkapkan temuan kecurangan kepada publik dan memberikan opini yang relevan maka kualitas audit akan semakin meningkat. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Sriyanti (2019) menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Temuan tersebut menunjukkan ketika semakin tinggi pengalaman yang dimiliki auditor akan semakin meningkatkan kualitas audit. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Hanjani (2014) yang menemukan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Kamil et al., (2018) menemukan bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Disamping etika profesi dan pengalaman auditor, meningkatnya kualitas audit juga dapat dipengaruhi oleh independensi. Menurut Lesmana dan Machdar (2015) mengungkapkan independensi merupakan kebebasan yang dirasakan auditor selama bekerja. Kebebasan yang dimaksud berkaitan dengan wewenang, hingga pemberian opini audit yang bebas dari intimidasi atau pengaruh dari pihak luar. Semakin tinggi kebebasan yang dirasakan auditor dalam melakukan kegiatan audit maka akan semakin meningkatkan kualitas audit. Dengan demikian peneliti menduga bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh independensi terhadap kualitas audit diperoleh oleh Amran dan Selvia (2019) yang menemukan bahwa semakin tinggi independensi auditor akan semakin meningkatkan kualitas audit. Temuan yang sama juga diperoleh oleh Kamil et al., (2018) yang menemukan bahwa semakin kuat nilai independensi yang dirasakan auditor dalam bekerja akan semakin meningkatkan kualitas audit, selanjutnya hasil penelitian yang sama juga

diperoleh oleh Rahayu dan Suryono (2016) yang menemukan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan kepada uraian fenomena penelitian, serta adanya pro dan kontra hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengajukan sebuah penelitian replikasi yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Suryono (2016), pada penelitian ini dibuat sejumlah perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan waktu dan tempat penelitian. Diharapkan dengan adanya perbedaan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian yang akan diperoleh. Secara lengkap penelitian ini berjudul: **Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Kerja Auditor dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Auditor BPK Sumatera Barat.**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang maka diajukan beberapa pertanyaan yang akan dibuktikan yaitu:

1. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?
3. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian rumusan masalah maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah membuktikan dan menganalisis secara empiris tentang pengaruh:

1. Etika auditor terhadap kualitas audit

2. Pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit
3. Independensi auditor terhadap kualitas audit

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi:

1. Instansi hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan kebijakan bagi auditor BPK Sumatera Barat khususnya dapat mendorong meningkatnya reputasi mereka dan terselenggaranya kegiatan audit yang berkualitas
2. Praktisi hasil yang diperoleh dapat menambah khasanah pengetahuan pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini khususnya mengenai sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas audit auditor.